

Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sri Winarsih Ramadana¹, Mariana^{2*}, Rahmaniar³, Saiful Bahgia⁴

^{1,3,4} Politeknik Kutaraja

² STIS Al-Hilal Sigli

wirna.taryono@gmail.com, marianamer02@gmail.com, rahmaniar233@gmail.com,
saiful.bahgia@akuntanindonesia.or.id

*Corresponding Author

Diajukan : 10 April 2023

Disetujui : 13 April 2023

Dipublikasi : 13 April 2023

ABSTRACT

This study aimed to determine the effect of capital expenditure and accrual directors on financial performance in Aceh local government. The research method used is a quantitative approach using secondary data. The data analysis method used in this research is multiple linear regression. The population in this study were all districts/cities in Aceh Province, totaling 23 City Districts, with the observation year taken being 2017-2019. From 23 samples with three years of observation, 69 observations were obtained. The results showed that capital expenditure affects the financial performance of local governments. However indicates that local governments make capital expenditures appropriately and effectively, so this can improve the financial performance of local governments. Accrual directors affect the financial performance of local governments. However, by using an accrual accounting system, directors can better evaluate the financial performance of local governments.

Keywords: *Financial Performance, Capital Expenditure, Accrual Directors*

PENDAHULUAN

Seiring waktu, ekonomi daerah mengalami administrasi perubahan yang sangat mendasar sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama pelaksanaan otonomi daerah, menawarkan peluang yang lebih baik kepada daerah, potensi daerah. dan dalam hal sumber daya manusia serta keuangan dan sumber daya lainnya. itu adalah kekayaan daerah (Sisdianto & Nengsih, 2017).

Tujuan utama dari penerapan akuntansi berbasis akrual adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam akuntansi berbasis akrual, pendapatan dan pengeluaran dicatat saat terjadi, bukan hanya saat uang masuk atau keluar. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan real-time tentang posisi keuangan mereka, dan memudahkan mereka dalam melakukan perencanaan keuangan jangka panjang serta dalam membuat keputusan strategis yang lebih baik (Ridha, 2018). Manfaat dari penerapan akuntansi berbasis akrual adalah meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, memperkuat pengawasan dan pengendalian internal, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan menjamin kelangsungan keuangan.

Direksi yang menerapkan akuntansi berbasis akrual dapat memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, terutama dalam hal belanja modal atau investasi jangka panjang. Hal ini dikarenakan akuntansi berbasis akrual memberikan informasi yang lebih akurat mengenai posisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan investasi. Penerapan akuntansi berbasis akrual memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik, termasuk perencanaan belanja modal. Pemerintah daerah yang menerapkan akuntansi berbasis akrual dapat dengan mudah



mengetahui ketersediaan dana dan mengalokasikan anggaran belanja modal secara efisien dan efektif, serta memantau kinerja investasi secara teratur.

Selain itu, belanja modal juga dapat berdampak positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah (Abdullah & Junita, 2020; Herawati et al., 2021; Mubarok et al., 2022; Purwono et al., 2016; Wadjaudje et al., 2018). Investasi belanja modal yang dilakukan dengan benar dapat memberikan dampak positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan pendapatan. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, untuk memastikan bahwa investasi belanja modal tersebut memberikan manfaat jangka panjang bagi pemerintah daerah, direksi harus melakukan evaluasi dan pemantauan yang cermat terhadap kinerja investasi tersebut.

Penerapan akuntansi berbasis akrual juga dapat membantu dalam memantau kinerja investasi belanja modal pemerintah daerah dengan lebih akurat dan transparan. Informasi keuangan yang diperoleh dari akuntansi berbasis akrual dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai aliran kas dan kinerja keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan. Selain itu, akuntansi berbasis akrual juga dapat membantu dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan dana pemerintah daerah. Dengan informasi keuangan yang lebih akurat dan transparan, direksi dapat melakukan perencanaan dan penganggaran belanja modal secara efektif dan efisien, serta memantau kinerja investasi dengan lebih baik.

Penerapan akuntansi berbasis akrual dapat berdampak kinerja keuangan pemerintah daerah (Martí, 2013; Ridha, 2018; Rohman et al., 2018; Wahyuni, 2022), terutama dalam hal belanja modal atau investasi jangka panjang. Namun, direksi perlu melakukan evaluasi dan pemantauan yang cermat terhadap kinerja investasi untuk memastikan bahwa investasi tersebut menghasilkan manfaat jangka panjang bagi pemerintah daerah. Sektor publik dapat menggunakan informasi non-keuangan dan keuangan, termasuk informasi biaya berbasis akrual, untuk menilai kinerja keuangan (Kuroki & Motokawa, 2021; Martí, 2013). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja modal dan direksi akrual terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah Aceh.

STUDI LITERATUR

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan hasil tindakan dan program yang dicapai terkait dengan penggunaan anggaran, yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam hal ini, kegiatan keuangan pemerintahan daerah mengacu pada pertumbuhan pekerjaan di bidang keuangan daerah, termasuk anggaran dan realisasi PAD, dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan berdasarkan politik atau hukum, peraturan periode anggaran negara. Untuk mengukur kinerja organisasi, ada beberapa metrik kinerja (Herawati et al., 2021). Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dengan berbagai cara, namun beberapa indikator yang umum digunakan adalah sebagai berikut pertumbuhan ekonomi, pendapatan pemerintah, belanja pemerintah, anggaran defisit/surplus, dan utang pemerintah. Namun, perlu diingat bahwa kinerja keuangan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh faktor-faktor politik dan sosial. Oleh karena itu, evaluasi kinerja keuangan pemerintah harus dilakukan secara komprehensif dan holistik.

Pengukuran kinerja adalah proses pemantauan dan pelaporan terus menerus atas hasil operasional, terutama kemajuan menuju tujuan yang direncanakan. Banyak perhatian terhadap pengukuran kinerja berasal dari keyakinan bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, penghematan dan produktivitas dalam organisasi sektor publik (Ridha, 2018). Hasil ini tercermin dalam laba atas aset dan laba atas investasi perusahaan (Kimunduu et al., 2017). Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu daerah. Indikator kinerja keuangan dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu daerah dalam mengelola keuangannya, seperti kemampuan dalam menghasilkan pendapatan, pengeluaran yang efisien, mengelola utang, dan pengelolaan aset yang baik (Sari et al., 2016).

Belanja Modal

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 2 Tahun 2011, Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap, inventaris yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam belanja modal adalah jenis belanja pemerintah daerah yang memberikan manfaat dan meningkatkan kekayaan atau kemakmuran daerah selama lebih dari satu tahun anggaran (Djatmika, 2022).

Belanja modal merupakan pengeluaran uang yang dilakukan untuk mendapatkan aset tetap yang akan memberikan manfaat atau pendapatan dalam beberapa tahun ke depan. Contohnya, pembelian tanah, gedung, mesin, peralatan produksi, dan sebagainya. Namun, tidak semua pengeluaran untuk hasil jangka panjang termasuk dalam belanja modal. Biaya pengelolaan limbah, biaya promosi, dan biaya penelitian dan pengembangan, misalnya, biasanya tidak termasuk dalam belanja modal, melainkan dianggap sebagai biaya operasional. (Mariana & Ibrahim, 2022; Muhamad et al., 2018).

Direksi Akrua

Istilah "akrua" mengacu pada konsep akuntansi fundamental mengenai waktu pengakuan peristiwa ekonomi dalam laporan keuangan. Akuntansi akrua adalah sistem akuntansi di mana transaksi dan arus lainnya antara unit institusi diakui ketika nilai ekonomi ditransfer, bertambah, atau berkurang, terlepas dari waktu penerimaan atau pembayaran kas terkait (Khan, 2013). Salah satu hasil kajian yang dilakukan oleh IFAC Public Sector Committee menyatakan bahwa pelaporan berbasis kinerja berguna untuk mengevaluasi kinerja administrasi publik dari segi biaya pelayanan, efisiensi dan pencapaian target. Dengan pelaporan berbasis akrua adalah metode pelaporan keuangan yang menghasilkan informasi tentang aset, kewajiban, dan modal serta kinerja keuangan dalam periode tertentu, dengan mendasarkan pada pencatatan transaksi keuangan yang terkait dengan waktu terjadinya dan bukan saat uang diterima atau dibayarkan (Ridha, 2018).

Total akrua adalah nilai selisih antara arus kas bersih dari aktivitas operasional pada periode tahun tertentu dengan surplus atau defisit. Akrua adalah istilah akuntansi yang mengacu pada pendapatan atau biaya yang belum direalisasi atau belum dibayarkan pada periode tertentu. Total akrua ini dapat memberikan informasi mengenai perubahan kekayaan bersih pemerintah daerah dalam periode tertentu. Tingkat akrua sebenarnya tidak berkaitan dengan jenjang penerapan akrua pada laporan keuangan, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan entitas dalam menghasilkan akrua. Tingkat akrua dapat dihitung dengan membandingkan total akrua dengan pendapatan atau biaya dalam suatu periode. Tingkat akrua yang tinggi menunjukkan kemampuan entitas dalam menghasilkan akrua yang lebih besar. Akrua yang diharapkan dan akrua abnormal juga benar. Akrua yang diharapkan memang dihasilkan dari aktivitas manajemen Pemerintah Daerah yang tidak terdistorsi oleh praktik manajemen angka akuntansi. Sedangkan akrua abnormal adalah akrua yang disebabkan oleh praktik diskresi manajemen dalam mengelola angka akuntansi, seperti memperlambat pembayaran hutang atau mempercepat penerimaan pendapatan. Akrua abnormal memang sulit untuk diukur secara langsung, sehingga biasanya dihitung sebagai selisih antara total akrua dengan akrua yang diharapkan (Rohman et al., 2018).

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal untuk pembangunan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat dan pelayanan publik, serta mengangkat harkat dan martabat daerah otonom. Oleh karena itu, anggaran belanja modal harus relevan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah, terutama fasilitas publik, seperti pelayanan umum dan kegiatan ekonomi (Bolen, 2019).

Belanja modal dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Abdullah & Junita, 2020; Herawati et al., 2021; Mubarak et al., 2022; Purwono et al., 2016; Wadjaudje et al., 2018). Jika belanja modal dilakukan dengan benar dan efisien, hal ini dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi biaya operasional pemerintah daerah. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini, belanja modal dapat meningkatkan produktivitas pemerintah

daerah dengan menghasilkan aset produktif yang dapat meningkatkan output dan pelayanan publik. Contohnya, pembangunan jalan, jembatan, gedung, dan fasilitas umum lainnya dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik.

Belanja modal juga dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dengan menciptakan peluang ekonomi baru. Contohnya, pembangunan infrastruktur dapat menarik investasi swasta dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi. Selain itu, belanja modal yang efisien juga dapat mengurangi biaya operasional pemerintah daerah dalam jangka panjang. Namun, jika belanja modal dilakukan secara tidak efisien dan tidak terencana dengan baik, hal ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah secara negatif. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dapat mengakibatkan pemborosan dan risiko gagal investasi.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh kinerja keuangan (Abdullah & Junita, 2020; Andirfa et al., 2016; Antari & Sedana, 2018; Asnidar & Hardi, 2019; Herawati et al., 2021; Leki et al., 2018; Mubarok et al., 2022; Purwono et al., 2016; Rechberger et al., 2010; Sisdiyanto & Nengsih, 2017; Wadjaudje et al., 2018), hasil penelitian berbanding terbalik ditemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh kinerja keuangan (Anggraeni, 2016).

H₁ : Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Pengaruh Direksi Akruwal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi berbasis akrual merupakan sistem akuntansi yang mencatat transaksi pada saat terjadi atau ketika hak dan kewajiban telah timbul, bukan pada saat uang berpindah atau transaksi uang tunai. Dalam sistem akuntansi berbasis akrual, pengakuan pendapatan dan biaya dilakukan pada saat terjadinya, bukan pada saat uang diterima atau dibayarkan. Sistem ini fokus pada pengukuran dan pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu entitas, lembaga atau instansi secara akurat dan lengkap (Wahyuni, 2022). Petugas anggaran di Pemda yang menghadapi kondisi fiskal yang sulit semakin mengurangi alokasi anggaran dengan menggunakan informasi biaya berbasis akrual yang tinggi dan juga informasi kinerja non-keuangan yang buruk. Informasi biaya berbasis akrual seharusnya menjadi acuan yang masuk akal dalam jangka panjang ketika petugas anggaran memutuskan tingkat pengurangan anggaran untuk program-program yang berkinerja buruk (Kuroki & Motokawa, 2021).

Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Ridha, 2018; Rohman et al., 2018; Wahyuni, 2022). Direksi yang menerapkan akuntansi berbasis akrual dapat memperoleh informasi keuangan yang lebih akurat dan transparan, sehingga dapat memantau kinerja keuangan pemerintah daerah dengan lebih efektif. Dalam hal ini, penggunaan akuntansi berbasis akrual dapat membantu direksi dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan pencapaian tujuan jangka panjang, bukan hanya fokus pada pencapaian target pendapatan dan pengeluaran dalam periode tertentu. Dengan demikian, direksi dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan efektif, serta mampu mengelola risiko keuangan dengan lebih baik.

Selain itu, akuntansi berbasis akrual dapat membantu direksi dalam memantau aliran kas secara keseluruhan, termasuk dalam mengukur nilai aset dan kewajiban di masa depan. Dengan memiliki informasi keuangan yang lebih akurat dan transparan, direksi dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan efektif, serta dapat menghindari risiko kerugian dan korupsi. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa direksi akrual berpengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah (Ridha, 2018; Rohman et al., 2018; Wahyuni, 2022).

H₂ : Direksi Akruwal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

METODE

Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh pada tahun 2017-2019, yang berjumlah 23 kabupaten/kota. Sedangkan sampel yang diambil sebanyak 69 observasi, dengan metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria laporan dari pemerintah kabupaten/kota yang mempublikasi laporan secara online

dan informasi dalam LKPD auditan yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan demikian, sampel yang diambil merupakan representasi dari populasi yang ada.

Operasional Variabel

Tabel 2. Definisi dan Pengukuran Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Parameter	Skala
Kinerja Keuangan	Kinerja keuangan adalah hasil kegiatan dan program yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Herawati et al., 2021).	Angka/nilai rupiah surplus/deficit dalam laporan operasional	Ratio
Belanja Modal	Belanja modal adalah jenis belanja pemerintah daerah yang memberikan manfaat dan meningkatkan kekayaan atau kemakmuran daerah selama lebih dari satu tahun anggaran (Djarmika, 2022).	Belanja/Rupiah anggaran belanja modal dalam laporan realisasi anggaran	Ratio
Direksi Akrua	Pelaporan berbasis akrual adalah metode pelaporan keuangan yang menghasilkan informasi tentang aset, kewajiban, dan modal serta kinerja keuangan dalam periode tertentu, dengan mendasarkan pada pencatatan transaksi keuangan yang terkait dengan waktu terjadinya dan bukan saat uang diterima atau dibayarkan (Ridha, 2018).	$EXPACCR_{jt} = ACCR_{jt} - ABNA_{CCR_{jt}}$	Ratio

Sumber: Data diolah (2023).

Metode Analisis Data

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja modal (X1), direksi akrual (X2) adalah variabel independent dan kinerja keuangan (Y) sebagai variabel dependen. Untuk menguji hubungan antara belanja modal, direksi akrual dengan kinerja keuangan, menggunakan regresi linier berganda (Mariana & Rahmani, 2022; Mariana & Ramadana, 2020; Ramadana & Agustina, 2022) dirumuskan:

$$Y = a + bX + bZ + \epsilon$$

Keterangan:

- Y = Kinerja Keuangan;
- X = Belanja Modal;
- b = Koefisien regresi;
- a = Konstanta; dan
- ϵ = Error term.

Ada dua jenis uji hipotesis, yaitu uji hipotesis simultan (uji-F) dan uji hipotesis parsial (uji-t). Pengujian hipotesis secara simultan (uji-F) menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok sampel atau lebih. Namun, sebelum hipotesis diuji secara simultan atau parsial, terlebih dahulu harus dilakukan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas (Mariana et al., 2018).

HASIL

Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas dilakukan pada nilai residual dari model regresi yang dibangun. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal, sehingga asumsi normalitas pada analisis regresi terpenuhi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa

analisis regresi yang dilakukan layak digunakan (Asymp. Sig. (2-tailed)) > 0.050 yaitu sebesar 0,51, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 1 Hasil Uji Normal

		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.36834380
Most Extreme Differences	Absolute	.159
	Positive	.069
	Negative	-.159
Test Statistic		.159
Asymp. Sig. (2-tailed)		.051 ^c

Sumber: Data diolah (2023).

Uji Multikolinieritas

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun tidak terdapat gejala multikolinieritas. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan nilai Tolerance dan VIF (variance inflation factor) untuk semua variabel dalam model. Nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10 menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel dalam model. Tolerance dan VIF digunakan untuk memeriksa keberadaan multikolinieritas dalam model regresi. Multikolinieritas terjadi ketika ada korelasi yang kuat antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi. Hal ini dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat dalam analisis regresi. Tolerance adalah ukuran seberapa banyak variasi dari sebuah variabel independen yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lain dalam model. Nilai Tolerance yang rendah menunjukkan adanya multikolinieritas, dapat dilihat Table 2.

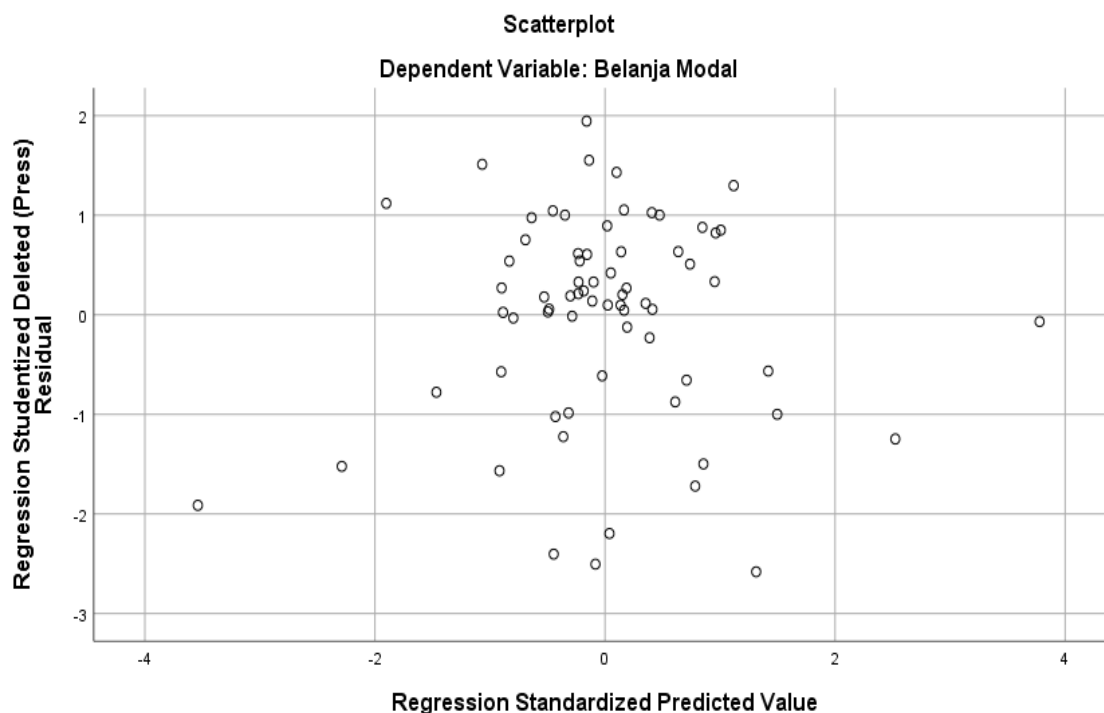
Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Belanja Modal	.979	1.021
Direksi Akrua	.979	1.021

Uji Heteroskedastisitas

Hasil regresi scatterplots (lihat gambar 1) menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang dibangun. Heteroskedastisitas terjadi ketika varians residual tidak konstan pada semua level variabel independen. Hal ini dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat dalam analisis regresi, sehingga penting untuk memeriksa keberadaan heteroskedastisitas dalam model regresi. Dalam hal ini, karena hasil scatterplots menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Oleh karena itu, model tersebut layak digunakan untuk memprediksi variabel independen..

Gambar 1 Scatterplot



Pengujian Hipotesis

Tabel 3 Coefficients^a

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	3.815	2.271		1.680	.098
Belanja Modal	.293	.138	.245	2.119	.038
Direksi AkruaI	.326	.119	.315	2.729	.008
Nilai f	Sig	R	R Square	Adjusted R Square	
5.247	0,008	.370	.137	.111	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dibangun pengertian $Y = 3.815 + 0.293X_1 + 0.326X_2 + e$

Hasil uji F dan signifikansi menunjukkan adanya pengaruh bersama-sama variabel independen (belanja modal dan direksi akruaI) terhadap variabel dependen (kinerja keuangan) dengan tingkat signifikansi sebesar 0.008 yang lebih kecil dari alpha (0.05). Artinya, hasil ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Namun, nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan pada tabel menunjukkan bahwa variabel independen hanya dapat menjelaskan 13.7% variasi pada variabel dependen. Artinya, masih terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan yang tidak dijelaskan oleh variabel belanja modal dan direksi akruaI. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai signifikansi untuk variabel belanja modal sebesar 0.038 dengan besaran nilai t sebesar 2.119 yang lebih kecil dari alpha 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, koefisien variabel belanja modal sebesar 0.293 menunjukkan bahwa jika belanja modal naik 1%, maka kinerja

keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 29.3%, dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif yang cukup besar terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan belanja modal dengan tepat dan efektif, maka hal ini dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Misalnya, investasi dalam infrastruktur dapat meningkatkan daya tarik daerah bagi investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan laba pemerintah daerah.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk investasi dalam infrastruktur, aset tetap, dan pengembangan sumber daya manusia, sementara kinerja keuangan pemerintah daerah mencakup aspek-aspek seperti pendapatan, belanja, dan laba/rugi. Namun, jika belanja modal tidak dikelola dengan baik atau tidak efektif, hal ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah secara negatif. Misalnya, pengeluaran yang tidak terencana dan tidak memperhitungkan pengaruhnya terhadap kas pemerintah daerah dapat mengakibatkan defisit anggaran yang dapat berdampak buruk pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan anggaran dan belanja modal secara efektif dan efisien agar dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh kinerja keuangan (Abdullah & Junita, 2020; Andirfa et al., 2016; Antari & Sedana, 2018; Asnidar & Hardi, 2019; Herawati et al., 2021; Leki et al., 2018; Mubarak et al., 2022; Purwono et al., 2016; Rechberger et al., 2010; Sisdianto & Nengsih, 2017; Wadjaudje et al., 2018), hasil penelitian berbanding terbalik ditemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh kinerja keuangan (Anggraeni, 2016).

Pengaruh Direksi AkruaI terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai signifikansi untuk variabel direksi akruaI adalah 0.008 dengan besaran nilai t sebesar 2.729 dan lebih kecil dari alpha 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa direksi akruaI berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, koefisien variabel direksi akruaI sebesar 0.326 menunjukkan bahwa jika direksi akruaI naik 1%, maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 32.6%, dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwa direksi akruaI memiliki pengaruh positif yang cukup besar terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Direksi akruaI berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah, hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan sistem akuntansi akruaI, direksi dapat mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan lebih baik. Pemerintah dapat mengukur pendapatan dan belanja dengan lebih akurat, dan melihat posisi keuangan secara keseluruhan. Dengan informasi yang lebih lengkap dan akurat, direksi dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Direksi AkruaI adalah sistem akuntansi yang didasarkan pada prinsip akruaI, yaitu pencatatan transaksi keuangan berdasarkan waktu terjadinya, bukan berdasarkan waktu pembayaran atau penerimaan. Sistem ini memungkinkan pengukuran kinerja keuangan yang lebih akurat dan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi keuangan pemerintah daerah. Selain itu, dengan adopsi sistem akuntansi akruaI, pemerintah daerah dapat memperbaiki tata kelola keuangan mereka, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat laporan keuangan yang akurat dan terpercaya. Ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pemerintah daerah, serta membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif.

Secara keseluruhan, adopsi sistem akuntansi akruaI oleh pemerintah daerah dapat berdampak positif pada kinerja keuangan mereka, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa bahwa direksi akruaI berpengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah (Ridha, 2018; Rohman et al., 2018; Wahyuni, 2022).

KESIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian di atas bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan belanja modal dengan tepat dan efektif, maka hal ini dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Misalnya, investasi dalam infrastruktur dapat meningkatkan daya tarik daerah bagi investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan laba pemerintah daerah. Direksi akrual berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah, hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan sistem akuntansi akrual, direksi dapat mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan lebih baik. Pemerintah dapat mengukur pendapatan dan belanja dengan lebih akurat, dan melihat posisi keuangan secara keseluruhan. Dengan informasi yang lebih lengkap dan akurat, direksi dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

REFERENSI

- Abdullah, S., & Junita, A. (2020). Determinan Kinerja Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah. *Akuntabilitas*, 13(1), 109–124. <https://doi.org/10.15408/akt.v13i1.14953>
- Andirfa, M., Basri, H., & A.Majid, M. S. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(3), 30–38.
- Anggraeni, A. (2016). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Students' Researches*, 1–18. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8707>
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 7(2), 1080–1110.
- Asnidar, & Hardi, N. S. (2019). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 9–18. <https://doi.org/10.33772/jak-uh.v7i1.24546>
- Bolen, K. K. (2019). The Effect of Financial Performance and Balanced Funds on Capital Expenditure of Local Government in District/City in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(4), 129. <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i4.15583>
- Djatmika, G. H. (2022). The Effect of Regional Original Income And Balancing Funds on The Allocation of Capital Expenditures in Regencies/Cities of North Sumatra Province. *Neuro Quantology*, 20(7), 107–114. <https://doi.org/10.14704/nq.2022.20.7.NQ33013>
- Herawati, Syamsurijal Tan, Sri Rahayu, & Syahmardi Yacob. (2021). The Effect of Financial and Non-Financial Performance on Regional Competitiveness of Bungo District With Capital Expenditure and Budget Governance As Intervening. *International Journal of Social Science*, 1(4), 347–354. <https://doi.org/10.53625/ijss.v1i4.713>
- Khan, A. (2013). Accrual Budgeting: Opportunities and Challenges. *International Monetary Fund*, 11, 339–360.
- Kimunduu, G. M., Mwangi, M., Kaijage, E., & Ochieng, D. E. (2017). Intervening Effect of Cash Holdings in the Relationship Between Financial Performance and Dividend Policy. *European Scientific Journal, ESJ*, 13(28), 264. <https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n28p264>
- Kuroki, M., & Motokawa, K. (2021). Do non-financial performance and accrual-based cost information affect public sector budgeting? *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 34(6), 95–116. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-03-2021-0056>
- Leki, Y., Naukoko, A. T., & Sumua, J. I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5), 164–174.
- Mariana, M., & Ibrahim, A. (2022). Determinan Cash Holding pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pendahuluan. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 1–13. <http://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/28>
- Mariana, M., Nadirsyah, N., & Abdullah, S. (2018). Accounting Information, Non-Accounting Information and Lending Decision. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 177–186.

<https://doi.org/10.22219/jrak.v8i>

- Mariana, & Rahmaniari. (2022). Pengaruh Motivasi dan Independensi Auditor Terhadap Kinerja Auditor. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 76–86.
- Mariana, & Ramadana, S. W. (2020). Determinant of Firm Value LQ45 on Indonesia Stock Exchange. *Journal of Social Science*, 1(4), 137–141. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200331.003>
- Martí, C. (2013). Performance Budgeting and Accrual Budgeting A Study of the United Kingdom, Australia, and New Zealand. *Public Performance & Management Review*, 37(1), 33–58. <https://doi.org/10.2753/PMR1530-9576370102>
- Mubarak, M. H., Nasution, A. A., Kesuma, S. A., & Pangestu, W. (2022). Local government financial performance: the effects of capital expenditure and intergovernmental revenue (The case of South Sumatra Province, Indonesia). *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 9(6), 503–512. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i6.11364>
- Muhamad, B., Hutama, N., Adib, M., & Si, A. (2018). The Influence of Capital Expenditure Towards Company's Profitability. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(2).
- Purwono, J., Sugyaningsih, S., & Yuliati, E. (2016). Analisis Tingkat Kemandirian dan Kinerja Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Belanja Modal Provinsi Jambi 2001 - 2012. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 1(3), 17–34.
- Ramadana, S. W., & Agustina. (2022). Pengaruh Dividend Payment dan Leverage terhadap Cash Holding pada Perusahaan Building Construction Bursa Efek Indonesia. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 1–10.
- Rechberger, S., Hartner, M., Kirchler, E., & Hämmerle, F. K. (2010). Tax amnesties, justice perceptions, and filing behavior: A simulation study. *Law and Policy*, 32(2), 214–225. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2009.00316.x>
- Ridha, A. (2018). Pengaruh Laporan Keuangan Berbasis AkruaI Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Aceh. *SIMEN (Akuntansi Dan Manajemen) STIES*, 9(2), 37–49.
- Rohman, A., Daud, R., & Ubaidillah. (2018). Analisis Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan, Diskresi AkruaI Dan Tingkatan AkruaI Terhadap Kinerja Keuangan. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(3), 486–512.
- Sari, I. P., Agusti, R., & Rofika. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *Journal Of Management*, 3(1), 679–692.
- Sisdianto, E., & Nengsih, N. (2017). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Realisasi Belanja Modal, dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu). *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 10(1), 48–67. <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/profita/article/view/2894>
- Wadjaudje, D. U., Susanti, S., & Pahala, I. (2018). Pengaruh Belanja Modal, Investasi, Jumlah Wisatawan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 5(2), 105–128.
- Wahyuni, A. S. dan A. (2022). Analisis Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan Kinerja Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 7(2), 59–66.